



1 Tahun Kerja Presiden Prabowo & Kabinet Merah Putih

Langkah Awal Transformasi Bangsa



"Presiden Indonesia, seorang pemimpin yang luar biasa, Prabowo. Beliau adalah pemimpin yang luar biasa dan dihormati oleh semua orang."

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump
30 September 2025

"Kami mengenal Presiden Prabowo sebagai sahabat bagi Rusia. Anda sosok yang bukan hanya dihormati sebagai tokoh militer, tetapi juga sebagai pemimpin politik terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, hubungan Rusia-Indonesia akan terus tumbuh dengan semangat persahabatan yang telah terjalin selama puluhan tahun."

Presiden Rusia, Vladmir Putin
31 Juli 2024



"Presiden Prabowo sahabat dekat saya. Hubungan negara kita strategis dan penuh persahabatan. Prancis berdiri di sisi Indonesia, karena kita berbagi pandangan yang sama tentang tatanan dunia."

Presiden Prancis, Emmanuel Macron
28 Mei 2025

"Saya percaya kepemimpinan Anda akan membawa Indonesia meraih capaian baru, memperkuat peran di kawasan dan dunia, serta menuju Indonesia Emas 2045."

Presiden Tiongkok, Xi Jinping

9 November 2024



"Saudaraku Presiden Prabowo, India merasakan ketulusan kepemimpinan Anda dan persahabatan yang Anda bawa dari Indonesia. Kemitraan India-Indonesia akan semakin kokoh di masa depan."

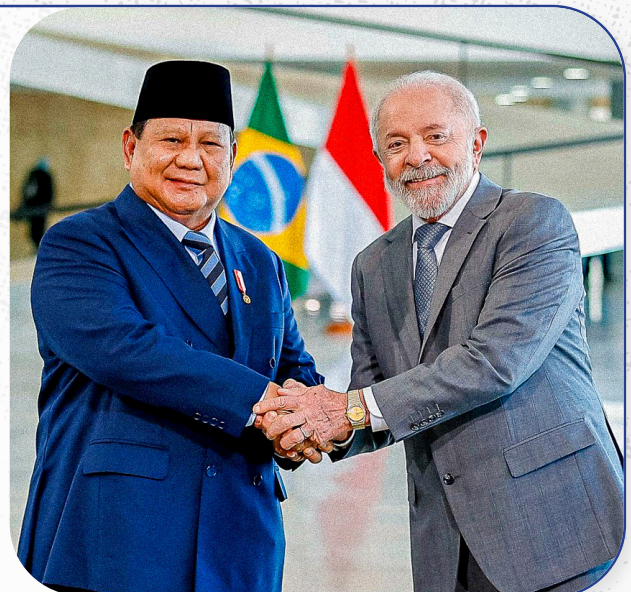
Perdana Menteri India, Shri Narendra Modi

2 Februari 2025

"Merupakan kehormatan besar menerima sahabat saya, Presiden Prabowo, di Brasília. Menyambut Indonesia sebagai anggota BRICS bagaikan membuka pintu rumah bagi seorang sahabat lama."

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

9 Juli 2025



Highlight **Capaian Kerja**

Capaian per 20 Oktober 2025

“

*Sabdo pandito ratu; Setiap janji
kampanye yang terucap dituntaskan.*

Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

”



Pertumbuhan ekonomi stabil tinggi di 5%, salah satu tertinggi di G20.



Inflasi terjaga di 2%, salah satu terendah di G20.



Defisit APBN terjaga di bawah batas 3% dari PDB, salah satu terendah di G20.

IHSG ▾

Index Harga Saham Gabungan

8,001.26

⬆ 70.01(+0.88%) Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah.



Angka kemiskinan turun ke 8,47%, terendah sepanjang sejarah.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke 4,76%, terendah sejak krisis 1998.



Untuk pertama kalinya dalam sejarah, terbentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk ketepatan bantuan sosial.



12.508 dari 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah aktif di seluruh Indonesia.



1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak 6 Januari 2025.

36.700.000 dari 82.900.0000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita sudah menerima MBG.



43.000.000 orang sudah memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis.



Sudah 166 dari 500 Sekolah Rakyat sudah beroperasi.



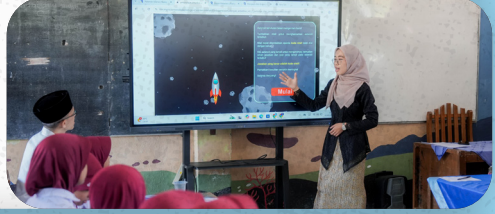
15.945 siswa siswi dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 sudah bersekolah di Sekolah Rakyat.



16.140 gedung SD, SMP, dan SMA sederajat sedang direnovasi secara tuntas.



288.000 sekolah tahun ini menerima *Interactive Flat Panel* (IFP) 75 inch dengan konten pembelajaran interaktif.



Tunjangan guru ditingkatkan dan dikirimkan langsung dari Pemerintah Pusat ke penerima.



1.044.174 mahasiswa mendapat beasiswa KIP Kuliah.



Untuk pertama kalinya, Universitas Indonesia tembus top 200 QS *University Ranking*.





Kementerian Haji didirikan, biaya haji turun, waktu tunggu haji dipercepat dari 40 tahun jadi 26 tahun.



Pemerintah Arab Saudi setuju pembangunan Kampung Indonesia di kota Mekkah.



Untuk pertama kali dalam sejarah, pengemudi ojek online menerima Bonus Hari Raya (BHR).



Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%, paling signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.



625.400 lapangan kerja baru di SPPG tercipta dari program MBG.



18.895 UMKM, Koperasi, BUMDes jadi bagian dari ekosistem MBG.



Realisasi investasi Januari - September 2025 Rp. 1.434 triliun, naik 13,7% dari periode yang sama di 2024, menciptakan 1.956.346 lapangan kerja baru.



100.000 lulusan S1 mendapatkan program magang dengan upah UMR ditanggung Pemerintah.



Danantara mengelola lebih dari USD 1.000.000.000.000 aset BUMN, menjadi SWF terbesar ke 5 di dunia.

CATL dan ANTAM investasi
Rp. 100.000.000.000.000 bangun pabrik
baterai terbesar di Indonesia.



67.000 pelaku UMKM, petani, dan
nelayan kembali mendapatkan akses
permodalan ke perbankan.



81.613 Koperasi Desa / Kelurahan Merah
Putih sudah terbentuk.



Koperasi Desa akan meringankan
beban hidup masyarakat dengan
jual minyak goreng, LPG dan pupuk
bersubsidi sesuai harga jual.



145 aturan distribusi pupuk
bersubsidi dihapus, pupuk langsung
dari pabrik ke petani.



Harga beli gabah naik ke Rp. 6.500 / kg.



Nilai Tukar Petani melonjak ke 123,
tertinggi sepanjang sejarah.



Produksi beras nasional Januari –
Oktober 2025 capai 31.038.197 ton,
tertinggi sepanjang sejarah.



Cadangan Beras Pemerintah di
gudang BULOG capai 4.200.000 ton,
tertinggi sepanjang sejarah.





225.000 hektar cetak sawah baru dalam proses dicetak.



2025, tahun pertama Republik Indonesia ekspor bantuan beras ke Palestina.



100 dari 4.000 Kampung Nelayan Merah Putih dibangun di 2025.



1.582 kapal nelayan modern sedang dibangun dan akan dibagikan.



Gaji hakim tingkat terendah naik 280%.



Rp. 300.000.000.000.000 anggaran negara rawan dikorupsi telah dialihkan untuk program-program pro rakyat.



Kasus-kasus korupsi besar diungkap dan diproses hukum. *No more untouchables.*



Sudah lebih dari Rp. 1.000.000.000.000.000 kerugian negara diselamatkan oleh penegak hukum.



Lebih dari 4 juta hektar kebun sawit dalam kawasan hutan disita dan dikuasai oleh Negara.

Lebih dari Rp. 100.000.000.000.000 kerugian dari tambang ilegal dan penyelundupan hasil tambang dihentikan.



Pertahanan Indonesia diperkuat dengan 100 batalyon teritorial pembangunan baru.



535 km tanggul laut di pantai utara Jawa akan segera dibangun, untuk melindungi 50.000.000 penduduk dari banjir rob.



Perjanjian dagang bebas (CEPA) dengan Uni Eropa dan Kanada diselesaikan.



Kontingen Indonesia ikut defile *Republic Day India*, 26 Januari 2025.



Kontingen Indonesia membuka defile *Bastille Day Prancis*, 14 Juli 2025.



Di Sidang Umum PBB ke-80, Presiden menawarkan 20.000 pasukan perdamaian untuk akhiri konflik di Gaza, Ukraina dan daerah lainnya.



Bangsa Indonesia kembali berperan besar dalam perdamaian dunia, dan kembali terhormat di mata dunia.



Daftar Isi

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Makan Bergizi Gratis	15
Cek Kesehatan Gratis	17
Peningkatan Gaji Guru	18
Penurunan Biaya dan Waktu Tunggu Haji	19
Penanganan Bencana	20
Pembatasan Usia Penggunaan Media Sosial	21
Pembangunan Sekolah Rakyat	22
Program Renovasi Sekolah dan Madrasah	25
<i>Smart Board</i> di Setiap Sekolah	26
Pembangunan Ekosistem SMA Unggulan	27
Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah	28
Penuntasan TB Dengan Deteksi dan Skrining	29

Pemberdayaan Masyarakat

Penghapusan Buku / Tagih Utang Macet UMKM	30
Data Tunggal Sosial Ekonomi	31
Kenaikan UMP 2025: 6,5%	32
Optimalisasi Penyaluran Bansos	33
Pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih	34

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Diskon Tarif Pesawat & Tarif Tol	35
BPHTB, PPN dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Gratis	36
Ekspansi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	37
<i>Masterplan</i> Pembangunan <i>Giant Sea Wall</i> Banten - Gresik	38
Rencana Penuntasan Pembangunan IKN sebagai Ibukota Politik	39

Daftar Isi

Pangan

2 Juta Hektar Lahan Baru Produksi Beras	40
Harga Serap Gabah Rp. 6.500 / kg	41

Perekonomian

Devisa Hasil Ekspor 1 Tahun di Indonesia	43
PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah	44
PPN dan PPNBM Ditanggung Pemerintah untuk EV dan <i>Hybrid</i>	45
Pendirian Bank Emas	46
Penyelamatan Buruh Sritex	47
Pemberian Bonus Hari Raya untuk Pengemudi <i>Online</i>	48
Pembentukan BPI Danantara dan Upaya Akselerasi Hilirisasi	49

Keuangan Negara

Penghematan Anggaran Tidak Perlu	50
Penyelesaian Sistem Perpajakan Modern	51

Perencanaan Pembangunan Negara

Penyelesaian RPJMN 2025-2029	52
------------------------------	----

PAN & Reformasi Birokrasi

Pembentukan 48 Kementerian Kabinet Merah Putih	53
Retret Kepala Daerah Periode 2025-2030	54

Daftar Isi

Politik dan Keamanan

Pemanfaatan Maung Sebagai Mobil Presiden (dan TNI-POLRI)	55
Pembentukan CSIRT di Setiap Instansi Pemerintah	56

Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pengungkapan Korupsi Pertamina	57
--------------------------------	----

Politik Luar Negeri

Indonesia Bergabung Dengan BRICS	58
Indonesia Menjadi Pemimpin D8	59
Mengunjungi dan Menerima Pimpinan Negara Sahabat	60
Aksesi Indonesia ke OECD	62
Penyelesaian Kesepakatan Dagang Indonesia - Canada CEPA	63
Penyelesaian Kesepakatan Dagang Indonesia - EU CEPA	64

1 TAHUN KERJA PRESIDEN PRABOWO & KABINET MERAH PUTIH

Makan Bergizi Gratis



MBG di SD Jati 03,
Jakarta, Rabu, 7
Mei 2025.

Urgensi Kebijakan

- Berdasarkan data Kemenko PMK tahun 2023: 32% dari 44 juta anak menderita anemia, 41% dari 44 juta anak tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan 58% dari 44 juta anak pola makannya tidak sehat. Dari data Kemenkes, angka prevalensi *stunting* beberapa tahun terakhir relatif stagnan di 21%.
- Implementasi Makan Bergizi Gratis di berbagai negara terbukti meningkatkan kesehatan dan gizi, terutama mengurangi angka *stunting* dan malnutrisi pada anak-anak dan kelompok rentan. Bahkan kelompok kerja PBB School Meals Coalition menargetkan implementasi MBG dilakukan oleh semua negara pada tahun 2030 karena MBG dinilai “investasi terbaik Pemerintah untuk SDM”.
- Implementasi Makan Bergizi Gratis juga terbukti mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan akses kelompok rentan terhadap makanan berkualitas.



MBG di Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat
Daya, 11 Februari 2025.

Kerja Pemerintah

- Per 20 Oktober 2025 telah terbangun 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 Provinsi se-Indonesia yang melayani lebih dari 36,7 juta porsi MBG setiap hari.
- Setiap SPPG menciptakan 50 lapangan kerja tetap baru di dapur dan rantai pasok MBG, sehingga per 20 Oktober 2025 telah tercipta 625.400 lapangan kerja tetap baru. Dan 18.895 UMKM, Koperasi, BUMDes jadi bagian dari ekosistem MBG.
- Pemerintah menargetkan adanya 32.000 SPPG di akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat langsung, berdampak untuk 165 juta penerima manfaat tidak langsung (orang tua murid), dan menciptakan 2,2 juta lapangan kerja tetap baru.

“

*Aku kan sudah tua.
Aku kerja di sini
diterima sama MBG
sini, aku senang sekali.*

*Berkesannya di
sini, saat pagi hari
menyiapkan makanan
untuk anak-anak.*

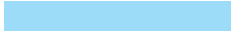
*Saya teringat cucu
saya di rumah, untuk
membawa bekal
ke sekolah dan di
pekerjaan saya.*

*Jadi teringat anak
dan cucu saya dulu.*

Suratina,
Pekerja SPPG



Cek Kesehatan Gratis



*Cek Kesehatan Gratis
KG di MIN 8 Jagakarsa,
4 Agustus 2025.*

Urgensi Kebijakan

- Angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 71 tahun - lebih rendah dari rata-rata dunia di 72 tahun. Dengan angka ini, Indonesia menempati urutan 115 dari 194 negara. Angka harapan hidup Thailand di 76 tahun dan Singapura di 83 tahun.
- Setiap tahun, ratusan ribu orang Indonesia meninggal karena penyakit yang bisa diatasi dengan deteksi dini. Menurut Kementerian Kesehatan, penyebab kematian tertinggi di 2023 adalah penyakit stroke, jantung iskemik, diabetes, dan TB.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit, dan deteksi penyakit lebih awal sebagai upaya mengurangi beban ekonomi akibat pengobatan di level rumah tangga dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.



*CKG di Puskesmas
Rote Ndao, NTT,
Jumat, 23 Mei 2025.*

Kerja Pemerintah

- Pada 10 Februari 2025, melalui aplikasi Satu Sehat, pemerintah memberikan hadiah ulang tahun berupa Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas. Kado ini, sejak awal Maret, bisa diklaim oleh masyarakat kapan saja tidak bergantung pada tanggal ulang tahun
- Cek Kesehatan Gratis yang dapat diklaim dari aplikasi Satu Sehat mencakup skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.
- Per 20 Oktober sebanyak 43.000.000 orang telah memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis.

Peningkatan Gaji Guru



Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada para guru pada Hari Guru Nasional, di Jakarta International Velodrome, Kamis, 28 November 2024.

Urgensi Kebijakan

- Menurut Kemendikbudristek, pada tahun ajaran 2023/2024 ada 3,3 juta guru di Indonesia. Namun, sebagian besar guru belum mendapatkan tingkat kesejahteraan yang baik.
- Menurut riset yang dilakukan Smeru pada 2014, *teacher absenteeism* atau ketidakhadiran guru di Indonesia -seringkali karena mengerjakan pekerjaan lain - sangat tinggi. Angkanya berkisar di 10 persen.
- Peningkatan kesejahteraan guru penting agar guru bisa lebih fokus dalam mengajar tanpa terbebani masalah ekonomi, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme pengajar.



Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada para guru pada Hari Guru Nasional, di Jakarta International Velodrome, Kamis, 28 November 2024.

Kerja Pemerintah

- Peningkatan Anggaran Kesejahteraan Guru: Pemerintah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru dari Rp. 64,9 triliun pada 2024 menjadi Rp. 81,6 triliun pada 2025, naik sekitar Rp. 16,7 triliun.
- Guru ASN menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok sedangkan Guru Non-ASN tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp. 2 juta per bulan.
- Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG): Pemerintah melaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1 pada 2025, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.

Penurunan Biaya dan Waktu Tunggu Haji



Presiden Prabowo meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu, 4 Mei 2025.

Urgensi Kebijakan

- Salah satu pilar agama dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah (Makkah). Ritual ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan secara historis telah dilakukan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.
- Menurut data Kementerian Agama, penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 87% dari seluruh populasi Indonesia, atau sekitar 270 juta orang.
- Pada tahun 2025, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah biaya riil per jemaah haji mencakup seluruh kebutuhan jemaah, seperti tiket penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya. Komponen BPIH terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan ke jemaah dan Nilai Manfaat yang merupakan hasil dari pengelolaan dana haji oleh pemerintah.



Kerja Pemerintah

- BPIH untuk penyelenggaraan haji di tahun 2025 adalah Rp. 89 juta. Dari biaya ini, pemerintah memutuskan 62% dibebankan ke jemaah atau rata-rata Rp. 55 juta - turun Rp. 1 juta dibandingkan tahun 2024 di Rp. 56 juta.
- Walau sudah turun Rp. 1 juta per jemaah, Presiden Prabowo bersama Kementerian Agama dan BP Haji terus mencari cara untuk menurunkan biaya haji yang dibebankan ke jemaah, salah satunya dengan membangun Kampung Haji di Makkah.
- Kementerian Haji dibentuk 8 September 2025, dan waktu tunggu haji dipangkas dari 40 tahun jadi 26 tahun.

Penanganan Bencana

Urgensi Kebijakan



Presiden Prabowo mengecek korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Bekasi, Sabtu, 8 Maret 2025.

- Indonesia berada dalam Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) yang menyebabkan risiko tinggi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Selain itu, kondisi geografis kepulauan memperbesar risiko banjir, longsor, dan bencana terkait perubahan iklim.
- Oleh karena itu, pemerintahan yang tanggap bencana sangat penting untuk mengurangi dampak bencana serta melindungi keselamatan warga.
- Dampak bencana baik alam maupun non-alam seperti pandemi, krisis ekonomi, atau konflik sosial dapat menghancurkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang responsif mampu menyediakan sistem perlindungan sosial, pemulihan ekonomi yang cepat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial.

Kerja Pemerintah



Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau peralatan pemadaman karhutla, Selasa, 29 Juli 2025.

- Presiden Prabowo dan Menko PMK Pratikno memperkuat kolaborasi multipihak dalam tata kelola pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan pascabencana alam dan nonalam, seperti letusan Gunung Lewotobi, pemulihan Konflik Adonara, kebakaran Kemayoran, dan penanganan bencana banjir Jabodetabek
- Pemerintah juga telah dilakukan berbagai upaya tanggap darurat bencana antara lain pemberian bantuan dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mengurangi curah hujan yang tinggi.
- Pemerintah juga telah membangun Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika. Pembangunan gudang logistik ini adalah jawaban dari krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023 yang menewaskan enam orang (5 orang dewasa, dan 1 bayi).

Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial



Presiden Prabowo dalam acara “Bersama Jaga Anak Indonesia Digital Aman Bangsa Hebat” di Istana Negara, Jumat 28 Maret 2025.

Urgensi Kebijakan

- Menurut hasil survei *National Center for Missing & Exploited Children*, Indonesia menempati posisi keempat dunia dan kedua di tingkat *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dengan kasus pornografi anak terbanyak.
- *Transparency Report* mencatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemblokiran konten pornografi anak terbanyak pada kuartal II-2022 hingga kuartal I-2024.
- Studi UNICEF menemukan bahwa 89% anak-anak di Indonesia menggunakan gawai pintar selama 5,4 jam per hari, dengan 50,3% di antaranya telah melihat konten bermuatan seksual.

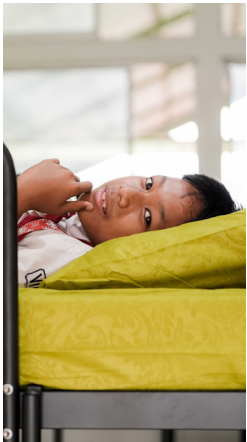


Enam menteri dari Kabinet Merah Putih dalam acara Festival Lindungi Anak di Era Digital: Digital Aman, Anak Hebat di Museum Penerangan TMII, Jakarta Timur, Kamis 31 Juli 2025.

Kerja Pemerintah:

- PP 17 / 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) telah diterbitkan. PP 17 / 2025 mengatur batas usia minimum bagi pengguna media sosial dengan pertimbangan klasifikasi usia anak dan risiko keamanan bagi anak, yang meliputi upaya pencegahan, penanganan, pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik.
- Untuk mencegah pembuatan akun oleh pengguna di bawah umur, Komdigi akan berkolaborasi dengan *platform* media sosial untuk mewajibkan penerapan sistem verifikasi usia yang lebih ketat.
- Per Agustus 2025, sudah ada beberapa platform digital yang memperkenalkan produknya yang ramah anak, seperti *Instagram for Teens*.

Pembangunan Sekolah Rakyat



Siswa di asrama Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kabupaten Bogor, 14 Juli 2025.

Urgensi Kebijakan

- Sesuai dengan UUD 1945, pendidikan memiliki peran utama dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Setiap anak, termasuk yang berasal dari keluarga tidak mampu, harus mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat berkembang dan berkontribusi bagi negara.
- Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.”
- Pendidikan sudah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup manusia. Dengan menyediakan pendidikan bermutu berasrama bagi anak-anak tidak mampu, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan agar anak-anak tidak mewarisi kondisi ekonomi sulit dari orang tuanya.



Sekolah rakyat di Sentra Handayani Bampu Apus Jakarta Timur, 9 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA menjadi solusi bagi pelajar tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas, sesuai dengan hak setiap warga negara.
- Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep *boarding school* untuk memastikan siswa tidak hanya bersekolah gratis, tetapi juga mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mendukung tumbuh kembang siswa dengan optimal.
- Per 20 Oktober 2025, sebanyak 166 dari 500 Sekolah Rakyat sudah beroperasi. Dan 15.945 siswa siswi dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 sudah bersekolah di Sekolah Rakyat.

“

*Terima kasih Pak Prabowo,
saya jadi bisa melanjutkan
sekolah saya lagi.*

Nayla,
Penerima Manfaat Sekolah Rakyat



“

*Untuk Bapak Presiden Prabowo,
terima kasih telah membuat
Sekolah Rakyat. Karena ini buat
orang-orang tidak mampu.*

Andra Friski R.,
Penerima Manfaat Sekolah Rakyat



“

*Bapak Prabowo, berkah ya
Pak ya. Sehat terus, saya hanya
bisa mengucapkan terima kasih
banyak. Saya yakin, bantuan
Bapak bisa membuat anak
saya mengejar mimpinya.*

Ina Karisa,
Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat

”





Sofia,
Penerima Manfaat
Sekolah Rakyat

Dari hati Beta yang paling dalam. Sejak Beta tinggal di Sekolah Rakyat ini, banyak sekali yang berubah.

Setiap hari Beta makan nasi hangat dengan lauk telur, ikan, bahkan dengan daging ayam juga. Rasanya seperti mimpi Pak, karena di rumah biasanya Beta makan dengan nasi putih dengan garam saja. Sese kali juga ditambah sayur daun ubi.

Dulu beta tidur di kasur tipis di kamar sederhana. Tapi sekarang, Tuhan berkati Beta bisa tidur di kasur empuk, di kamar yang bersih dan nyaman di Sekolah Rakyat.

Program Renovasi Sekolah dan Madrasah

Urgensi Kebijakan



Suasana Sekolah
Leuwibatu 03,
2 Mei 2025.

- Menurut data Kemendikbudristek tahun 2024, terdapat 501.641 ruang kelas yang mengalami kerusakan di bawah binaan Kementerian Pendidikan. Serta terdapat 43.691 ruang kelas di bawah binaan Kementerian Agama yang mengalami kerusakan.
- Banyak fasilitas pendidikan di daerah 3T belum memadai, dengan 12.064 sekolah tidak memiliki perpustakaan, 4.988 sekolah kekurangan ruang kelas, 1.454 sekolah tanpa laboratorium, serta 5.783 sekolah belum memiliki akses listrik dan 10.692 sekolah tanpa internet.
- Kondisi ruang kelas dan sekolah sangat menentukan prestasi anak, karena lingkungan belajar yang aman dan nyaman berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain fasilitas utama, sarana penunjang seperti MCK juga sangat vital untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Kerja Pemerintah



Suasana SDN 4
Padurenan, Bekasi,
2 Mei 2025.

- Dalam APBN 2025, telah teralokasi anggaran Rp. 17,1 triliun untuk revitalisasi dan renovasi sekolah di seluruh Indonesia, dengan fokus:
 1. Renovasi 11.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sekolah yang mengalami kerusakan parah di daerah 3T dan akibat bencana.
 2. Pembangunan dan rehabilitasi toilet sekolah, penyediaan akses air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya.
 3. Prioritas diberikan kepada Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dengan penyediaan sarana perpustakaan, ruang kelas tambahan, dan laboratorium.

Smart Board di Setiap Sekolah



Digitalisasi SDIT Persis Bandung, 2 Mei 2025.

Urgensi Kebijakan

- Hasil pendidikan Indonesia masih harus terus ditingkatkan. Walaupun sebagian besar murid sudah mengikuti wajib belajar 12 tahun, ketika dilakukan penyesuaian antara rerata tahun bersekolah dengan mutu hasil belajar yang diwakili oleh HTS, maka angka bersekolah nasional 12,4 tahun menjadi 7,8 tahun *learning adjusted years in school*.
- Hasil dari pendidikan banyak tergantung pada kualitas guru. Namun saat uji kompetensi guru nasional tahun 2015 yang diikuti 1,6 juta guru, 80% tidak memenuhi nilai standar di seluruh mata pelajaran.
- Sembari mengupayakan peningkatan kualitas guru, banyak negara telah menerapkan layar pintar atau *smart board* sebagai alat bantu ajar di kelas. *Smart board* memungkinkan seorang guru menghadirkan guru terbaik nasional di secara virtual.



Digitalisasi di SDN 02 Bodas Karangjati, 2 Mei 2025.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah anggarkan hampir Rp. 9 triliun di 2025 untuk menyediakan 288.000 *smart board* di setiap sekolah di Indonesia untuk mendukung pendidikan.
- Presiden Prabowo menargetkan *smart board* sebagai sarana pembelajaran interaktif yang menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil yang kekurangan guru.
- Pengadaan *smart board* di sekolah akan dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program Ekosistem SMA Unggulan



Sekolah Garuda di
Palembang, 20 Mei 2025.

Urgensi Kebijakan

- UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.”
- Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki sekolah khusus yang didedikasikan secara nasional untuk pendidikan anak berbakat.
- Jika ada, sekolah-sekolah berkualitas tinggi dengan kurikulum internasional mematok harga sangat tinggi yang tidak terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia.



Sekolah Garuda di
Palembang, 20 Mei 2025.

Kerja Pemerintah

- Dalam lima tahun ke depan, Presiden membangun sedikitnya 20 SMA Unggul Garuda baru yang didanai oleh APBN, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum memiliki SMA unggulan.
- Dalam lima tahun ke depan, menciptakan ekosistem SMA unggulan yang memungkinkan hadirnya 100 SMA unggulan: 20 SMA Unggul Garuda baru dan 80 SMA Unggul Garuda transformasi.
- Mencetak dan meningkatkan kompetensi guru-guru berkualifikasi unggul untuk mengajar di SMA-SMA Unggulan.

Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah



Presiden Prabowo resmikan Bali International Hospital, Simbol Kemajuan Fasilitas Kesehatan Indonesia, 25 Juni 2025.

Urgensi Kebijakan

- Menurut laporan pantauan WHO pada 2023, Indonesia masih berada pada peringkat ke-55 terkait indeks layanan kesehatan. Hal ini diakibatkan oleh sebaran doket yang tidak merata, dengan persentase terbesar masih di Pulau Jawa.
- Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di provinsi NTT dan NTB yang hanya memiliki rasio 0.9 per 1.000 penduduk.
- Menurut riset Universitas Airlangga, rerata rujukan persentase dari fasilitas kesehatan daerah ke kota masih tergolong tinggi dengan besaran 2.027.598 kasus per bulan.



Presiden Prabowo Resmikan NSWAC, Bukti Kesiapan Indonesia Saingi Layanan Kesehatan Dunia, 25 Juni 2025.

Kerja Pemerintah

- Dalam APBN 2025, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan 66 RSUD dari tipe D menjadi tipe C, dengan prioritas pada rumah sakit di provinsi di luar Pulau Jawa.
- Selain membangun RS lengkap berkualitas, Menteri Kesehatan juga akan meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan tingkat primer untuk mendukung terlaksananya program Cek Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penuntasan TB Dengan Deteksi dan Skrining



Pertemuan Presiden Prabowo dan Bill Gates Bahas Kerja Sama Kesehatan Global, 7 Mei 2025.

Urgensi Kebijakan

- Menurut Global TB (tuberkulosis) Report 2023 dari WHO, Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dalam jumlah kasus TB baru, dengan lebih dari 1 juta kasus per tahun.
- Jumlah kematian TB setiap tahun di Indonesia mencapai 125.000 orang. Dalam 10 tahun, misalnya, sebanyak 1.250.000 orang sudah meninggal karena TB. Hal ini terjadi karena setiap 4 detik, 1 jiwa telah meninggal.
- TB tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan sosial. Keberadaan TB justru akan menghambat produktivitas masyarakat dan memperburuk kemiskinan.



Penyintas semangat atasi TBC, di Desa Siaga TB, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, 9 Mei 2025.

Kerja Pemerintah

- Dalam APBN 2025, Kementerian Kesehatan telah mendapatkan alokasi untuk mencari dan mendeteksi 900 ribu kasus TB dengan target 95% pasien menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.
- Kementerian Kesehatan juga akan menggencarkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait TB dan mengurangi stigma yang telah muncul terkait penyakit tersebut.
- Pemerintah telah mendorong percepatan penelitian vaksin M72/AS-1E, yang telah memasuki uji klinis fase 3, sebagai langkah pencegahan jangka panjang.

Penghapusan Buku/ Tagih Utang Macet UMKM



Presiden Prabowo menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM di Istana Merdeka, 5 November 2025.

Urgensi Kebijakan

- UMKM adalah penopang utama perekonomian Indonesia. Tercatat ada 66 juta unit usaha UMKM di Indonesia yang mempekerjakan 97% dari seluruh angkatan kerja.
- Berdasarkan data yang tercatat di Bank Himbara, pada pertengahan tahun 2024 terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang mengalami kredit macet di bank-bank anggota Himbara.
- Angka ini mencakup pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh peristiwa tertentu, seperti pandemi Covid-19, atau yang menjadi korban bencana alam seperti gempa bumi dan bencana lainnya.
- Angka ini juga mencakup pelaku UMKM yang tidak mampu lagi membayar utang dan utangnya telah jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun, dan utang tersebut sudah berada dalam proses penghapusan buku di bank-bank yang tergabung dalam Himbara.



Kerja Pemerintah

- Peraturan Pemerintah 47 / 2024 Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dasar hukum untuk menghapus utang macet dengan nilai maksimal sebesar Rp. 500 juta untuk setiap badan usaha, dan batas nilai utang adalah Rp. 300 juta untuk individu di bank-bank Himbara.
- Pemulihan akses pembiayaan dimana penghapusan utang macet memungkinkan pelaku UMKM yang sebelumnya terdaftar dalam daftar hitam kredit (SLIK) untuk kembali mengakses pembiayaan.
- Hal ini menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.

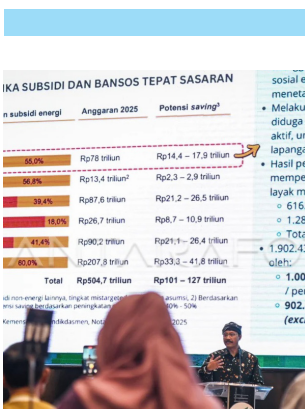
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional



Konferensi Pers terkait
DTSEN usai Rapat Terbatas
di Istana Merdeka, Jakarta,
Senin, 2 Juni 2025.

Urgensi Kebijakan

- Meraih 0% kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan membutuhkan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir. Langkah ini penting dilakukan agar pemerintah dapat memastikan bahwa program bantuan sosial, subsidi dan intervensi ekonomi diberikan tepat sasaran.
- Data yang akurat akan mengurangi penyalahgunaan dan kebocoran anggaran karena sistem data yang terintegrasi dapat mencegah adanya individu atau kelompok yang menerima bantuan ganda atau tidak memenuhi syarat penerimaan bantuan.
- Kelengkapan dan keakuratan data membuat rencana kebijakan pembangunan dapat lebih tepat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.



Menteri Sosial, Saifullah
Yusuf menyampaikan
paparannya di Rapat
Koordinasi Nasional DTSEN
di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Instruksi Presiden 4 / 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memungkinkan sinergi data antar instansi untuk memiliki satu data kemiskinan nasional.
- Implementasi DTSEN akan berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah karena tidak adanya tumpang tindih pemberian bantuan maupun program subsidi yang tidak tepat sasaran.
- Salah satu contoh implementasi DTSEN adalah penentuan kelayakan anak yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat, sehingga keluarganya juga mendapatkan bantuan renovasi rumah serta bantuan sosial lainnya.

Kenaikan UMP

2025: 6,5%



Presiden Prabowo Subianto mengumumkan terkait kebijakan ekonomi di Istana Merdeka, 17 Februari 2025.

Urgensi Kebijakan

- UU Nomor 6 Tahun 2023 mengamanahkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Di berbagai negara, kebijakan kenaikan UMP yang tepat dapat memberikan stimulus dimana daya beli pekerja akan meningkat.
- Penyesuaian upah minimum bisa mengimbangi kenaikan inflasi sehingga pekerja tetap memiliki penghasilan dan daya beli yang stabil, serta meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.



Presiden bersama ribuan buruh di Monas, Jakarta, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis, 1 Mei 2025.

Kerja Pemerintah

- Berdasarkan Peraturan Menaker 16 / 2024, kenaikan UMP di tahun 2025 adalah 6,5%. Kenaikan UMP ini cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan karena pendapatan yang meningkat membuat masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
- Kenaikan upah mendorong produktivitas karyawan yang pada akhirnya mendorong peningkatan *output* perusahaan. Potensi pajak penghasilan perusahaan dan karyawan dapat menambah penerimaan negara.
- Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan mengurangi potensi ketidakpuasan sosial dan potensi konflik industri.

Optimalisasi Penyaluran Bansos



Wamensos, Agus Jabo, mengunjungi rumah pemulung lansia. Di Desa Lemahputro, Sidoarjo, Kamis 9 Januari 2025.

Urgensi Kebijakan

- Anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 mencapai Rp. 78,2 triliun. Angka ini bukan angka yang kecil.
- Pemerintah perlu menjamin bantuan tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar rentan dan membutuhkan yang akan menerima bantuan sehingga setiap bantuan yang diberikan memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penerima.
- Salah satu cara optimalisasi adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi. Dengan sistem penyaluran yang lebih optimal, kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana bansos dapat ditekan.



Penerbitan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka. 2 Juni 2025.

Kerja Pemerintah

- Bantuan yang lebih tepat sasaran dan tersalurkan secara efisien akan memperkuat daya beli kelompok rentan, yang pada gilirannya juga membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
- Dengan sistem distribusi yang lebih baik, pemerintah dapat menghindari pemborosan anggaran dan membantu menjaga keseimbangan fiskal negara.
- Bantuan yang diberikan secara lebih adil dan transparan dapat meminimalisir konflik horizontal.

Pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih

Urgensi Kebijakan

- Sebagian besar masyarakat desa terjerat utang berbunga tinggi dari rentenir atau pinjaman *online* ilegal ketika berupaya mencari modal usaha sehingga menyebabkan kemiskinan berkepanjangan.
- Harga hasil pertanian dan perikanan yang tidak stabil berisiko merugikan produsen serta mengancam kesejahteraan desa, terutama jika tidak didukung mekanisme penyimpanan dan distribusi yang mampu menjaga keseimbangan pasar.
- Dengan 44% penduduk Indonesia tinggal di desa, penguatan ekonomi pedesaan menjadi krusial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah urbanisasi berlebihan.



Peresmian Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih. 21 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Menyediakan pendanaan hingga Rp. 3 miliar per Koperasi Merah Putih melalui skema pinjaman dari bank-bank Himbara untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan akses permodalan, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
- Mendirikan Koperasi Merah Putih di 80.000 desa yang dilengkapi kantor, gudang penyimpanan, gudang berpendingin, apotek desa, klinik desa, dan unit simpan pinjam, guna mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya secara ekonomi.
- Per 20 Oktober 2025, 81.613 Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk, dan 108 koperasi operasional. Ditargetkan seluruh koperasi operasional di akhir tahun 2025.



Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih. 21 Juli 2025.

Diskon Tarif Pesawat & Tarif Tol



Presiden Prabowo bersama Menteri BUMN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

Urgensi Kebijakan

- Pada umumnya, tarif pesawat selalu melonjak tinggi jelang libur akhir tahun dan libur Idulfitri. Tarif pesawat yang tinggi mengurangi mobilisasi selama periode yang bisa menggerakkan ekonomi daerah.
- Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap tarif pesawat, misalkan penetapan biaya parkir pesawat dan harga bahan bakar.



Menko Perekonomian mengumumkan tentang penurunan harga tiket pesawat di Istana Merdeka, Selasa, 26 November 2024.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan insentif kepada maskapai penerbangan dengan mengurangi biaya operasional, seperti biaya parkir pesawat dan harga bahan bakar yang lebih murah. Hal ini memungkinkan maskapai untuk menurunkan harga tiket bagi penumpang selama periode tertentu.
- Diskon tarif pesawat dan tol mengurangi biaya perjalanan udara dan darat bagi masyarakat yang ingin mudik atau berlibur selama Nataru, Lebaran, dan libur tengah tahun. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang pengeluarannya cukup besar selama periode tersebut.

BPHTB, PPN dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Gratis



Menteri PKP, Maruarar Sirait, usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Rabu, 30 Juli 2025.

Urgensi Kebijakan

- Pada tahun 2021, sekitar 12,7 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Dari jumlah tersebut, 84% atau sekitar 10,7 juta adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
- Harga hunian residensial di pasar terus meningkat, membuat masyarakat terutama generasi muda semakin sulit membeli rumah.
- Pada tahun 2019, sebanyak 81 juta generasi milenial di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Hanya 38% dari mereka yang berusia 26-30 tahun dan 40% yang berusia 31-35 tahun yang memiliki rumah.



Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau Rusun Samesta Margonda, Depok, 27 November 2024.

Kerja Pemerintah

- Pembebasan BPHTB dirancang untuk mendukung kepemilikan rumah layak huni oleh MBR. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan akses hunian layak, dengan penambahan sekitar 1,5 juta rumah tangga pada tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan tersebut.
- Pada 25 November 2024, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menandatangani SKB yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk membebaskan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi pembangunan rumah untuk MBR.

Ekspansi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan



Menteri PKP mengumumkan kuota KPR FLPP, Rabu, 18 Juni 2025.

Urgensi Kebijakan

- Berdasarkan data Susenas tahun 2023, sekitar 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 26,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah layak huni.
- Ekspansi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memungkinkan lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan terjangkau, termasuk suku bunga rendah dan tenor panjang, sehingga meringankan beban rakyat.
- Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.



Serah terima kunci kepada 32 orang penerima BSI KPR Sejahtera di Jakarta, Minggu 29 Juni 2025.

Kerja Pemerintah

- Presiden resmi meluncurkan program skema bantuan FLPP untuk mendukung 3 juta rumah murah pada 17 Februari 2025.
- Kuota awal FLPP tahun 2025 adalah 220.000 unit, dengan alokasi dana Rp. 28,2 triliun, lalu naik jadi 350.000 unit rumah.
- Per awal Agustus 2025, realisasi KPR subsidi dengan skema FLPP berjumlah 147.000 unit rumah.

Masterplan

Pembangunan *Giant Sea*

***Wall* Banten-Gresik**



Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Pembentukan Tanggul Laut di Pulau Jawa, 10 Juni 2025.

Urgensi Kebijakan

- Sepanjang 663 kilometer garis pantai utara Jawa mengalami abrasi dan 356 km mengalami akresi. Di sisi lain, laju penurunan muka tanah di Pantura berkisar 5 cm hingga 20 cm per tahun turut meningkatkan potensi banjir rob.
- Permasalahan banjir rob di Pantai Utara Jawa berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp. 10 triliun per tahun dan dapat meningkat secara eksponensial. Estimasi ini didasarkan pada dampak banjir tahunan di Jakarta saja, belum termasuk wilayah lain di sepanjang Pantura.
- Dengan laju urbanisasi yang terus meningkat serta rencana pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, Pantura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.



Presiden Prabowo di Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 IJCC, 12 Juni 2025.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah menetapkan tahap pertama Proyek *Giant Sea Wall* sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dimulai melalui Peraturan Presiden 12 / 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
- Pembangunan *Giant Sea Wall* merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan dan perlindungan ekonomi wilayah pesisir utara Jawa untuk menjaga masa depan bangsa Indonesia.
- Akselerasi pembangunan sea wall dilakukan dengan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) pada 25 Agustus 2025.

Rencana Penuntasan Pembangunan IKN Sebagai Ibu Kota Politik



*Presiden Prabowo Pimpin
Rapat Bahas Percepatan
Pembangunan IKN, 21
Januari 2025.*

Urgensi Kebijakan

- Indonesia ditargetkan untuk menduduki lima besar ekonomi dunia dengan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, dibutuhkan transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri melalui pemanfaatan sumber daya manusia, infrastruktur berbasis lingkungan dan digital, serta reformasi birokrasi.
- Pembangunan IKN merupakan bentuk realisasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di Kawasan Timur.
- Kondisi Jakarta yang berhadapan dengan penurunan tanah, kepadatan penduduk, dan ketergantungan pada infrastruktur lama membuatnya semakin rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.



*Kepala Otorita IKN,
Basuki Hadimuljono
usai pertemuan dengan
Presiden Prabowo terkait
penyelesaian infrastruktur
Legislatif dan Yudikatif di
IKN, 3 Februari 2025.*

Kerja Pemerintah

- UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan visi, misi, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan ibu kota baru sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.
- Presiden Prabowo menargetkan pembangunan infrastruktur utama untuk menopang IKN sebagai ibu kota politik Indonesia selesai di 2028.
- Untuk mendukung target tersebut, pemerintah pada 21 Januari 2025 telah menyetujui rencana anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025-2029.

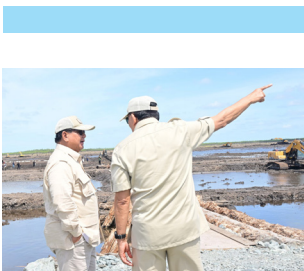
2 Juta Hektar Lahan Baru Produksi Beras



Presiden Prabowo Subianto bersama Mentan berkunjung ke Desa Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan, Minggu, 3 November 2024.

Urgensi Kebijakan

- Menurut Badan Pusat Statistik, impor beras di tahun 2024 mencapai 4,52 juta ton, naik tajam dari angka impor beras di 2023 yang hanya 3 juta ton dan sebanyak 429 ribu ton di 2022.
- Beras adalah sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pangan Nasional, konsumsi beras mencapai 31,2 juta ton pada 2024.
- Walaupun Produksi beras di 2025 naik berkat intervensi Presiden Prabowo untuk meningkatkan HPP gabah dan pangkas birokrasi pupuk subsidi. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, luas panen padi pada 2024 mencapai 10,05 juta hektar, yakni turun 167 ribu hektar dibandingkan 2023. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, yang terjadi setiap tahun, harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah.



Presiden Prabowo berkunjung ke Desa Wanam, Merauke, Papua Selatan, Minggu, 3 November 2024

Kerja Pemerintah

- Untuk menjaga swasembada beras, meningkatkan kemampuan ekspor beras, dan mengantisipasi penurunan produksi karena alih fungsi lahan, pemerintah menetapkan penciptaan 2 juta hektar lahan baru untuk produksi beras.
- Pada tahap awal, sebagian besar usaha pencetakan sawah baru dilakukan di Merauke, Papua Selatan.

Harga Serap Gabah

Rp. 6.500/Kg



Penyerapan gabah hasil panen raya di Majalengka, 7 April 2025.

Urgensi Kebijakan

- Menurut BPS, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di Desember 2024 ada di angka 124,3. Walau angka ini sudah merupakan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini belum memberikan kesejahteraan bagi petani.
- Kesejahteraan petani sangat tergantung pada harga jual dari gabah. Seringkali harga serap gabah di masa panen bisa turun hingga angka Rp. 3.500 / Kg.



Panen raya di Majalengka, 7 April 2025.

Kerja Pemerintah

- Melalui Keputusan Badan Pangan Nasional, per 24 Januari 2025, Perum Bulog wajib menyerap Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dengan harga Rp. 6.500/kilogram tanpa ada rafaksi.
- Implementasi kebijakan ini berhasil meningkatkan NTUP secara signifikan dan memperkuat cadangan pangan pemerintah di Perum Bulog ke 4,2 juta ton di awal Agustus 2025. Jumlah cadangan beras pemerintah ini yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri.

“

Sangat bersyukur kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan ada serap Bulog langsung ke masyarakat, bisa dirasakan hasilnya dan bisa membantu masalah perekonomian.

Nanang,
Penerima Manfaat Serap Gabah Bulog



Devisa Hasil Ekspor 1 Tahun di Indonesia



Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan kewajiban penyimpanan DHE SDA di dalam negeri. Senin, 17 Februari 2025.

Urgensi Kebijakan

- UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- Pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 264 miliar atau sekitar Rp. 4.200 triliun. Dari angka ini, 62% atau sekitar Rp. 2.600 triliun merupakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) seperti batu bara.
- Sebelum ada pengaturan terkait devisa hasil ekspor, sebagian besar keuntungan dari ekspor SDA dapat langsung dibawa ke luar negeri, sehingga likuiditas tidak dapat dimanfaatkan oleh bank-bank di dalam negeri untuk meningkatkan giat ekonomi dalam negeri.



Menko Ekon, Airlangga Hartarto menyampaikan terkait kebijakan DHE, 21 Januari 2025.

Kerja Pemerintah

- Berdasarkan penaksiran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dampak dari implementasi PP 8 / 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam adalah peningkatan devisa hasil ekspor sebesar USD 80 miliar di 2025, dan USD 100 miliar di 2026.
- Peningkatan ini akan memperkuat posisi devisa Indonesia. Cadangan devisa Indonesia di akhir Maret 2025 mencapai USD 157 miliar dan bertahan tinggi di USD 148 miliar di akhir September 2025 walau banyak tekanan eksternal terhadap Rupiah.

PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah



Konferensi Pers bertajuk "Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan" di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.

Urgensi Kebijakan

- UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memandatkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen yang berlaku tidak hanya untuk barang mewah, namun juga untuk barang non mewah mulai 1 Januari 2025.
- PPN merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Di 2023, pemerintah mencatat penerimaan PPN Rp. 749 triliun. Sebagai perbandingan, total seluruh penerimaan negara di 2023 adalah Rp. 1.869 triliun.
- Kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen mendapat respon negatif masyarakat karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.



Presiden Prabowo dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

Kerja Pemerintah

- PMK 131 / 2024 adalah PMK tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Dengan PMK 131 / 2024, tarif PPN efektif, selain untuk barang mewah seperti pembelian jet pribadi dan kapal pesiar pribadi, tetap di tarif 11% sehingga menjaga daya beli masyarakat.

PPN dan PPNBM Ditanggung Pemerintah untuk EV dan *Hybrid*



Pelanggan mengisi daya mobil listrik di SPKLU di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 9 Januari 2025.

Urgensi Kebijakan

- PPNBM DTP dan PPN DTP untuk Mobil Listrik dan Bus Listrik diperpanjang untuk mendorong dan memperluas penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
- Kriteria TKDN dalam Insentif PPNBM DTP dan PPN DTP diterapkan untuk merangsang pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri dan ramah lingkungan.
- Perluasan penggunaan kendaraan ramah lingkungan dapat mendorong perbaikan lingkungan dengan penurunan emisi karbon.



Acara diskusi bertajuk "Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah" di Jakarta, Selasa 14 Januari 2025.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP dan PPnBM DTP untuk kendaraan listrik dan *hybrid* hingga akhir 2025, sesuai PMK-12/2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Ketentuan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 (PMK-12/2025) yang diterbitkan dan mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.
- Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli dan mempercepat adopsi kendaraan listrik, dengan insentif 10% PPN DTP untuk mobil dan bus listrik (TKDN >40%), 5% untuk bus listrik (TKDN 20-40%), serta 3% PPnBM DTP untuk kendaraan *hybrid*.

Pendirian Bank Emas



Peresmian Layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

Urgensi Kebijakan

- Meskipun produksi tinggi, konsumsi emas per kapita Indonesia hanya 0,2 gram, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-31 di dunia. Harga yang tidak kompetitif dan kurangnya standarisasi emas membatasi permintaan domestik.
- Indonesia mengekspor *gold dore* sebesar USD 5 miliar dan mengimpor emas batangan sebesar USD 2 miliar per tahun.
- Bank Emas diharapkan memperluas diversifikasi produk perbankan, mengatasi akses pembiayaan terbatas bagi industri emas, dan memberikan imbal hasil bagi masyarakat yang menyimpan emas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.



Peresmian Layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah resmi meluncurkan Bank Emas pada tanggal 26 Februari 2025 dan menunjuk PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyimpan dan penyedia layanan bank emas pertama di Indonesia.
- Pengelolaan emas yang lebih optimal melalui Bank Emas diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi *gold value chain* dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB 1,6% atau Rp. 245 Triliun.
- Ekosistem Bank Emas diproyeksikan akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penyelamatan Buruh Sritex



Karyawan PT Sritex yang terkena PHK, 1 Maret 2025.

Urgensi Kebijakan

- PT Sritex dan anak perusahaannya mempekerjakan 10.969 pekerja, yang sebagian besar telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan durasi cukup lama. Setelah 58 tahun beroperasi sejak 1966, PT Sritex dinyatakan pailit pada 1 Maret 2025 karena tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur.
- Tanpa perhatian dan intervensi dari pemerintah, PHK massal di PT Sritex akan berdampak luas. Dampak ini tidak hanya terhadap buruh yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada puluhan ribu anggota keluarga mereka yang bergantung pada penghasilan tersebut.
- Selain itu, ekosistem ekonomi di Solo dan Jawa Tengah, yang selama ini didukung oleh keberadaan industri tekstil ini, turut terdampak akibat berhentinya operasional pabrik.



Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta terkait Penyelesaian Kepailitan PT Sritex, 3 Maret 2025.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah mendorong skema penyewaan aset Sritex kepada investor baru guna mempertahankan produktivitas pabrik. Langkah ini bertujuan untuk menjaga nilai aset perusahaan serta membuka peluang bagi pekerja terdampak agar dapat kembali bekerja.
- Kementerian Ketenagakerjaan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk pembayaran pesangon, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta akses terhadap program pelatihan ulang bagi pekerja agar dapat kembali terserap ke industri.
- Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mendorong kebijakan insentif bagi UMKM dan industri tekstil lainnya di sekitar Solo agar dapat menyerap tenaga kerja terdampak.

Pemberian Bonus Hari Raya untuk Pengemudi *Online*



Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan terkait pemberian THR dan bonus kepada para pekerja swasta, BUMN, dan BUMD, 10 Maret 2025.

Urgensi Kebijakan

- Sekitar 4 juta masyarakat Indonesia bekerja sebagai pengemudi ojek *online* dan telah melayani hingga 88 juta pengguna aplikasi. Beragam layanan seperti antar-jemput, pembelian, dan lainnya telah membantu mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat luas.
- Lapangan kerja yang diciptakan oleh aplikasi pengemudi *online* telah membantu banyak masyarakat, baik untuk mendapatkan penghasilan rutin maupun tambahan di waktu tertentu.
- Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi aplikasi ojek *online*. Mengingat hubungan kerja mereka bukan sebagai karyawan, para mitra tidak mendapatkan hak atas Tunjangan Hari Raya.



Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Istana Negara. Senin, 10 Maret 2025.

Kerja Pemerintah:

- Presiden Prabowo melalui Menteri Ketenagakerjaan meminta agar pengelola aplikasi pengemudi *online* memberikan bonus hari raya bagi mitra pengemudi.
- Melalui pemberian Bonus Hari Raya (BHR) oleh pengelola aplikasi, kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi serta meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat.

Pembentukan BPI Danantara dan Upaya Akselerasi Hilirisasi



Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), 24 Februari 2025.

Urgensi Kebijakan

- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 atau lebih cepat, dengan fokus pada inklusivitas dan kualitas.
- Hilirisasi SDA adalah peluang besar bagi Indonesia, namun selama ini bergantung pada investasi dan pinjaman asing akibat keterbatasan modal negara.



Presiden Prabowo meresmikan Wisma Danantara Indonesia di kawasan strategis Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 30 Juni 2025.

Kerja Pemerintah

- Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025, dengan modal awal Rp. 1.000 triliun dari penyertaan modal negara dan sumber sah lainnya, sesuai UU Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN.
- BPI Danantara memungkinkan pendanaan mandiri untuk proyek strategis nasional tanpa ketergantungan pada modal asing, mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi SDA untuk kesejahteraan rakyat.
- Danantara dikelola dengan pengawasan langsung Presiden RI, serta diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat untuk memastikan tata kelola investasi yang transparan dan efektif.

Penghematan Anggaran Tidak Perlu



Presiden Prabowo, Sidang Kabinet, Istana Presiden, Rabu, 22 Januari 2025.

Urgensi Kebijakan

- APBN 2025 sebesar Rp. 3.621 triliun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun, seringkali pemerintah menganggarkan kegiatan-kegiatan yang tidak esensial (seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, dan diskusi-diskusi) yang tidak memiliki efek pengganda ekonomi.
- Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, pemerintah harus mengelola belanja negara dengan disiplin.



Menkeu usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, 22 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi anggaran dengan pengawasan langsung oleh BPKP bersama Kemenkeu dan Kemensetneg.
- Presiden memimpin dengan memberi contoh. Di lingkungan Istana, perjalanan dinas sangat diminimalkan, rapat dilakukan di kantor atau melalui platform daring, dan seremoni dibuat lebih sederhana. Prinsip efisiensi ini dimulai dari atas sebelum diterapkan di kementerian dan lembaga lainnya.
- Pemerintah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp. 306,69 triliun dengan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung swasembada energi dan pangan maupun terobosan teknologi yang berdampak pada pengembangan sumber daya manusia.

Penyelesaian Sistem Perpajakan Modern



Aplikasi
Coretax.

Urgensi Kebijakan

- Sistem perpajakan Indonesia selama ini masih menggunakan cara pengungkapan tradisional yang mengandalkan kepatuhan dan kejujuran Wajib Pajak.
- Dari 20 negara dalam G20, rasio pendapatan negara Indonesia (12% dari PDB) adalah yang terendah. Pendapatan negara baik pajak maupun PBNP diyakini belum sesuai dengan standar sistem perpajakan modern.
- Untuk meningkatkan dampak kebijakan Pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, belanja Pemerintah—yang saat ini hanya sebesar 15% dari PDB dan merupakan yang terendah di antara negara-negara G20—perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, belanja Pemerintah dapat meningkat apabila pendapatan negara juga ditingkatkan.
- Berdasarkan estimasi Tax Justice Network (2023), Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan negara sebesar minimal USD 2,7 miliar (sekitar Rp. 44 triliun) per tahun akibat praktik penghindaran pajak oleh korporasi, serta USD 69 juta (sekitar Rp. 1 triliun) dari aliran dana tidak sah ke luar negeri.



Penyerahan
Formulir
SPT Pajak
Penghasilan
secara Online.

Kerja Pemerintah

- Implementasi sistem Coretax merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan transparansi dan meminimalisir penghindaran pajak dengan perhitungan sistem.
- Dengan sistem perpajakan modern, rasio penerimaan Indonesia ditargetkan mencapai 23% dari PDB di 2029. Misalnya, apabila menggunakan PDB Indonesia 2024 yang sebesar Rp. 22.000 triliun, maka pendapatan negara akan meningkat sebesar Rp. 5.000 triliun.

Penyelesaian RPJMN 2025-2029



Presiden Prabowo pada acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.

Urgensi Kebijakan

- Sistem ekonomi dan politik yang dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia kita, yaitu sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila (dikenal juga sebagai sistem ekonomi konstitusi) sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun dan mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
- Jika menggunakan paham ekonomi konstitusi, maka pemerintah harus proaktif dalam menyelesaikan pembangunan, pertanian, prasarana, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
- Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Pemerintah harus menjadi pelopor dan melakukan perencanaan pembangunan negara yang matang.



Presiden Prabowo pada acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.

Kerja Pemerintah

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun. RPJMN 2025 - 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
- Pembangunan nasional akan berpedoman pada RPJMN 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025 - 2045. RPJMN 2025 - 2029 menetapkan bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% paling lambat di tahun 2029.

Pembentukan 48 Kementerian Kabinet Merah Putih



Foto bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, 21 Oktober 2024.

Urgensi Kebijakan

- Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk peringkat ke-4 terbesar di dunia, dengan lebar setara dengan 27 negara Uni Eropa. Mengelola negara sebesar ini perlu kemampuan delegasi yang baik.
- Pemerintah perlu lebih fokus dan responsif terhadap tantangan nasional dan global. Program-program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan swasembada pangan dapat dijalankan dengan fokus yang lebih tajam dan terarah.
- Dengan kementerian yang lebih spesifik menangani sektor-sektor penting, pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan tertinggal dapat lebih dioptimalkan.



Presiden Prabowo melantik para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Kerja Pemerintah

- Presiden Prabowo membentuk kabinet dengan 48 Kementerian yang memiliki fokus yang jelas, seperti Badan Gizi Nasional untuk MBG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk renovasi sekolah dan kesejahteraan guru, serta Kementerian Kebudayaan untuk pelestarian budaya.
- Perubahan nomenklatur dilakukan untuk meningkatkan fokus kerja. Selain itu, kabinet ini terdiri dari pakar di berbagai bidang dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Retret Seluruh Kepala Daerah Periode 2025-2030

Urgensi Kebijakan



Presiden Prabowo pada penutupan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di Kompleks Akademi Militer, Magelang, 28 Februari 2025.

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah produk Reformasi yang memanfaatkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di tingkat I (Provinsi) dan tingkat II (Kabupaten dan Kota).
- Sebagai contoh, penyelenggaraan SD dan SMP adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Kota, sedangkan penyelenggaraan SMA adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- Contoh lainnya adalah pengelolaan ruang laut. Untuk pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil dari garis pantai hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sedangkan ruang laut setelah 12 mil dari garis pantai adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- Penyelenggaraan Pilkada Serentak, sebagai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 2024, mengakibatkan masa jabatan Kepala Daerah serentak dimulai di 2025. Masa jabatan Kepala Daerah yang hampir sama waktunya dengan masa jabatan Presiden memberikan kesempatan tersendiri.

Kerja Pemerintah



Retret Kepala Daerah, 28 Februari 2025.

- Dengan retret Kepala Daerah yang dihadiri oleh hampir seluruh Kepala Daerah periode 2025-2030, diharapkan seluruh program unggulan Pemerintah Pusat dapat didukung secara optimal oleh Pemerintah Daerah.
- Program yang perlu dukungan Pemerintah Daerah termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembangunan 3 juta rumah, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Maung Sebagai Mobil Presiden (dan TNI-POLRI)



Mobil Maung yang di gunakan Presiden Prabowo.

Urgensi Kebijakan

- Sebagai negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki mobil nasional dengan merek sendiri.
- Memiliki mobil yang didesain oleh Indonesia, diproduksi dengan komponen dari Indonesia, dan difabrikasi oleh Indonesia, sangat penting untuk ketahanan ekonomi serta ketahanan negara.



Presiden Prabowo di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025.

Kerja Pemerintah

- Maung buatan PT PINDAD merupakan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada alpalhankam asing sehingga menjadi opsi strategis untuk kendaraan operasional dalam negeri.
- Dengan ketangguhan, kelincahan, dan keandalan di berbagai medan, Maung menjadi pilihan ideal untuk operasional di daerah rawan dan terpencil.
- Pengadaan Maung untuk TNI-Polri bukan belanja mendadak, tetapi direncanakan sejak 2022 dan direalisasikan bertahap. Presiden Prabowo mulai menggunakan Maung sejak hari pertama menjabat pada 20 Oktober 2024, setelah memesan sejak Maret 2024.

Pembentukan CSIRT di Setiap Instansi Pemerintah



Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulisty Budi di Rakor Penyelenggara Sistem Elektronik Infrastruktur Informasi Vital Tahun 2025, Gedung Perpustakaan, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Urgensi Kebijakan

- Menurut hasil monitoring BSSN, pada tahun 2024 terdapat 300 juta *traffic internet* di Indonesia yang anomali atau ditenggarai disebabkan oleh serangan siber seperti botnet, trojan dan *phishing*.
- Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mulai berlaku di bulan Oktober 2024.
- Serangan siber terhadap instalasi TIK tidak hanya membocorkan data pribadi tapi juga dapat melumpuhkan infrastruktur kritis, seperti bocornya data KPU di Desember 2023 dan lumpuhnya server Bank Syariah Indonesia di Mei 2023. Oleh sebab itu, keberadaan *Cyber Security Incident Response Team* atau CSIRT memungkinkan instansi untuk merespons serangan siber dengan cepat.



Surat Tanda Registrasi CilacapKab-CSIRT dari Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulisty Budi pada acara Pengukuhan Bersama 43 Tim Tanggap Insiden Siber (TTISCSIRT), 22 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan CSIRT di setiap instansi pemerintah. Instruksi ini merupakan salah satu arahan pertama yang disampaikan Presiden usai pelantikannya.
- Per Oktober 2025, 87,2% dari 701 instansi Pemerintah memiliki CSIRT
- Ditargetkan pada akhir tahun 2025 seluruh instansi pemerintah sudah memiliki CSIRT baik dari talenta organik organisasi atau dari luar.

Pengungkapan Korupsi Pertamina

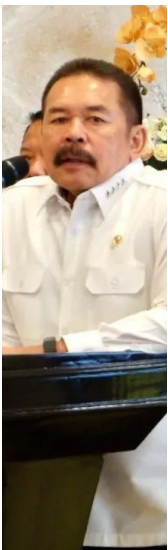
Urgensi Kebijakan



*Pengungkapan
Korupsi
Pertamina, Rabu
26 Februari 2025.*

- BUMN memiliki peran yang besar dalam ekonomi Indonesia. Total pendapatan BUMN di 2022 mencapai Rp. 2.916 triliun, dengan kontribusi ke pendapatan negara di tahun yang sama dari pajak, PNB dan dividen mencapai Rp. 548 triliun.
- Namun dibandingkan dengan total aset BUMN, *Return on Asset* BUMN hanya 2,2% dan *Return on Equity* hanya 6,2% - mengindikasikan BUMN belum dikelola dengan optimal.
- Praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih marak terjadi. Misalnya, sejak tahun 2004-2024, KPK menangani 168 perkara tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan BUMN dan BUMD.

Kerja Pemerintah



*Jaksa Agung
mengungkap
temuan korupsi
Pertamina, 6
Maret 2025.*

- Pada November 2024, Menko Polkam Budi Gunawan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menerbitkan Keputusan Menko Polkam 151 / 2024 membentuk tujuh *desk*, salah satunya *Desk* Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
- Sudah lebih dari Rp. 1.000 triliun yang negara diselamatkan dari hasil pengungkapan korupsi selama 300 hari pertama masa kerja Kabinet Merah Putih.
- Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina bukan hanya menjadi tantangan bagi tata kelola BUMN, namun juga sebagai momentum berbenah dan reformasi untuk memperkuat transparansi dan efektivitas.
- UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memuat perubahan signifikan yang bertujuan meningkatkan tata kelola dan kinerja BUMN melalui penguatan prinsip transparansi, efisiensi, dan pengawasan internal.

Indonesia Bergabung Dengan BRICS



Presiden Prabowo bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.

Urgensi Kebijakan

- Pada tahun 2024, negara anggota BRICS berkontribusi pada lebih dari 40% populasi dunia dan 30% dari PDB dunia.
- Di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan kekuatan besar, dan fragmentasi sistem perdagangan internasional, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu kelompok saja.
- Dengan menjadi bagian dari BRICS, sebuah negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu dan menguatkan kerjasama antar negara berkembang.



Presiden Prabowo pada KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Presiden Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri RI Sugiono ke KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (22-24 Oktober 2024) untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS.
- Pada 6 Januari 2025, Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah mendapat persetujuan konsensus dari seluruh anggota.
- Presiden Prabowo hadir dalam pertemuan BRICS pertamanya pada tanggal 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Indonesia Menjadi Pemimpin D8



Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis, 19 Desember 2024.

Urgensi Kebijakan

- *The Developing Eight* (D-8), sebuah organisasi ekonomi negara muslim berkembang yang terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, merupakan sebuah kekuatan transformatif dan menyimpan potensi yang sangat besar.
- Potensi sangat besar yang dimiliki setiap anggota D-8, terutama pemanfaatan ekonomi biru, dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setiap anggotanya
- Secara keseluruhan, D-8 mewakili pertumbuhan ekonomi ketiga terbesar secara global dengan gabungan PDB sebesar USD4,81 triliun pada tahun 2023.



Presiden Prabowo pada KTT Ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis, 19 Desember 2024.

Kerja Pemerintah

- Pada 19 Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Organisasi Kerja Sama Ekonomi Delapan Negara Berkembang (Development Eight/D-8) untuk bersiap menerima rotasi kepemimpinan organisasi tersebut.
- Dalam rangka mempersiapkan kepemimpinan Indonesia, yang efektif pada 1 Januari 2026, Presiden Prabowo mengajak negara anggota D-8 untuk memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama demi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi rakyat.

Mengunjungi dan Menerima Kunjungan Pimpinan Negara Sahabat



Presiden Prabowo pada Parade Militer Bastille Day 2025 di Place de la Concorde, Paris, Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025.

Urgensi Kebijakan

- Perputaran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan baik kita dengan negara-negara mitra dagang dan mitra investasi.
- Di tahun 2024, total ekspor Indonesia mencapai USD 264 milyar, atau setara Rp. 4.350 triliun - dengan mitra dagang utama Tiongkok, Amerika Serikat dan India.
- Di tahun 2024, total investasi asing mencapai Rp. 1.700 triliun - atau lebih dari 52,5% dari keseluruhan investasi yang direalisasikan di Indonesia.



Presiden Prabowo menerima Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.



Presiden Prabowo diterima oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden Turkiye, Ankara, Kamis, 10 April 2025.



Presiden Prabowo dijemput di bandara oleh Raja Yordania Abdullah II di bandara Amma, Minggu, 13 April 2025.

Implementasi Kebijakan

- Menjaga hubungan baik dengan negara sahabat merupakan aspek penting dalam diplomasi. Karena itu, Presiden Prabowo selalu menyempatkan hadir dalam pertemuan multilateral seperti APEC, G20, ASEAN, BRICS dan D8. Presiden Prabowo juga hadir dalam Sidang Umum PBB di New York, 23 September 2025.
- Sampai dengan 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo diantaranya Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, India, Turkiye, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Malaysia, Singapura, Thailand, Brasil, Inggris Raya, Ceko, Russia, Arab Saudi, Brasil, Perancis, Belarus, dan bertemu dengan pimpinan negara sahabat di negaranya.
- Presiden Prabowo telah menerima pimpinan negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta atau di Istana Kepresidenan Bogor, diantaranya Presiden Perancis, Presiden Turkiye, PM Tiongkok, PM Australia, PM Fiji, PM Jepang, dan PM Singapura.
- Dari pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral yang sudah dilakukan, Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi baru lebih dari Rp. 1.000 triliun.

Aksesi Indonesia ke OECD



Presiden Prabowo Terima
Sekretaris Jenderal OECD
di Istana Merdeka, 28
November 2024.

Urgensi Kebijakan

- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) beranggotakan 38 negara dengan merepresentasikan lebih dari 1,4 miliar penduduk dunia, dengan 60% PDB dunia dan 50% perdagangan dunia.
- Keanggotaan OECD sebuah negara bukan hanya sekedar simbol status, tetapi juga upaya untuk memperdalam integrasi ke ekonomi global. OECD berperan penting dalam merumuskan berbagai regulasi ekonomi dunia. Kepatuhan terhadap standar OECD juga berdampak pada peningkatan stabilitas ekonomi dan perbaikan lingkungan bisnis.



Menko Airlangga Temui
Sekjen OECD, di Paris,
Prancis, Selasa, 3 Juni 2025.

Kerja Pemerintah

- Aksesi Indonesia ke OECD merupakan keputusan strategis yang mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global.
- Aksesi ini juga menuntut Indonesia untuk melakukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan domestik agar selaras dengan standar OECD, termasuk dalam hal transparansi perpajakan, reformasi birokrasi, serta keberlanjutan ekonomi.
- Presiden Prabowo mendukung proses aksesi yang cermat dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan sektor-sektor kunci dan dampaknya terhadap daya saing industri nasional.
- Dengan strategi yang tepat, keanggotaan Indonesia di OECD dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

Penyelesaian Kesepakatan Dagang Indonesia - Canada CEPA



Presiden Prabowo dan PM Trudeau Sepakati Kerja Sama Strategis Indonesia-Kanada, 16 November 2024.

Urgensi Kebijakan

- Perdagangan bilateral Indonesia-Kanada tercatat sebesar USD 3,44 miliar pada 2023 dengan tren pertumbuhan positif sebesar 11,24% dalam lima tahun terakhir. Namun, Indonesia masih memiliki defisit perdagangan sebesar USD 864 juta pada 2024 dan USD 1,7 miliar dengan Kanada pada 2023.
- Pada 2021 Indonesia memulai perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Kanada sebagai upaya untuk mendorong ekspor produk Indonesia dan mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Kanada.



Presiden Prabowo dan PM Trudeau Sepakati Kerja Sama Strategis Indonesia-Kanada, 16 November 2024.

Kerja Pemerintah

- Penyelesaian substantif perundingan telah diumumkan oleh Presiden Prabowo dan PM Kanada Trudeau di sela-sela KTT APEC pada 15 November 2024 di Lima Peru.
- Pengumuman tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan pernyataan bersama antar menteri perdagangan kedua negara yang dilakukan 2 Desember 2024 termasuk dua nota kesepahaman yang meliputi kerjasama dalam sektor mineral kritis.
- Perjanjian Indonesia – Kanada CEPA ditandatangani pada 24 September 2025 dan berlaku mulai tahun 2026.

Penyelesaian Kesepakatan Dagang Indonesia - EU CEPA



Presiden Prabowo Bertemu Presiden Komisi Eropa, Sepakati Perundingan IEU-CEPA, 13 Juli 2025.

Urgensi Kebijakan

- Perdagangan barang antara Indonesia dan UE mencapai lebih dari EUR 30 miliar per tahun di tahun 2023.
- Pada umumnya, Indonesia mengimpor kendaraan bermotor, mesin industri, dan obat-obatan dari EU. Ekspor utama Indonesia ke EU mencakup minyak kelapa sawit, bijih tembaga, dan lemak industri.
- Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) berdampak pada komoditas ekspor Indonesia ke EU sehingga kedua pihak perlu segera mencapai titik temu dalam Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa.



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, 13 Juli 2025.

Kerja Pemerintah

- Perundingan Indonesia – EU CEPA telah berlangsung sebanyak 19 kali dalam sembilan tahun terakhir.
- Setelah proses negosiasi yang alot, perjanjian Indonesia – EU CEPA ditandatangani pada 22 September 2025.
- Dengan disepakatinya perjanjian dagang Indonesia - EU CEPA, hasil ekspor Indonesia, terutama bagi komoditas utama seperti sawit dan tekstil, ke Uni Eropa diharapkan semakin baik.





Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).



Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus melakukan penjelasan kepada DPR RI keputusan untuk mengurangi biaya haji yang dibebankan ke masyarakat, 6 Januari 2025.



Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan progress pemutakhiran DTSEN di Jakarta, 24 Desember 2024.



Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan diskon tarif pesawat dan tarif tol jelang Lebaran 2025 di 6 Februari 2025.



Seorang warga mencoba Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya, 10 Februari 2025.



Menko PMK Pratikno meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran untuk memastikan bantuan telah sampai ke warga yang terdampak bencana, 14 Desember 2024.



Presiden Prabowo bersama para Menteri Koordinator dan Menteri terkait mengumumkan kenaikan UMP 2025 di 29 November 2024.



Menteri Perumahan Maruarar Sirait melakukan ground breaking pembangunan rumah MBR, 5 November 2024.



Presiden Prabowo berbicara di hadapan ribuan guru pada peringatan Hari Guru Nasional, 28 November 2024 di Velodrome, Jakarta Timur.



Presiden Prabowo meneken Peraturan Pemerintah 47 / 2024 Penghapusan Piutang Macet di Istana Negara, 6 November 2024.



Presiden Prabowo bersama para Menteri Koordinator dan Menteri terkait mengumumkan beberapa kebijakan ekonomi termasuk optimalisasi penyaluran bansos di 17 Februari 2025.



Perumahan untuk MBR yang dibiayai dengan FLPP yang dibiayai dengan FLPP. Kabinet Merah Putih meningkatkan kuota FLPP dari 200.000 unit ke 350.000 unit per tahun.



Presiden Prabowo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau perkembangan cetak sawah di Merauke, 3 November 2024.



Presiden Prabowo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan video conference dengan petani di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Perpadu, 3 Februari 2025.



Presiden Prabowo membahas penerapan devisa hasil ekspor bersama Menteri Koordinator dan Menteri terkait, 21 Januari 2025.



Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet membahas tutup buku APBN 2024 di kantor Kementerian Keuangan, sekaligus menekankan kenaikan tarif PPN ke 12% hanya berlaku untuk barang mewah, 31 Desember 2024.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan berbagai insentif ekonomi termasuk PPN dan PPNBM Ditanggung Pemerintah untuk EV dan Hybrid, 16 Desember 2024.



Bertempat di kantor pusat Pegadaian, Presiden Prabowo meluncurkan Bank Emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025.



Presiden Prabowo mencontohkan efisiensi anggaran dengan menggelar acara-acara di Istana Negara, tidak di tempat lain yang memerlukan sewa gedung dan biaya perjalanan tinggi



Presiden Prabowo mengisi Musrenbangnas dalam rangka finalisasi RPJMN 2025-2029 di kantor Bappenas, 30 Desember 2024.



Presiden Prabowo membentuk kabinet yang sesuai kebutuhan Indonesia.



Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil Maung setelah dilantik di Gedung MPR DPR, 1 Oktober 2025.



Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho melakukan sosialisasi pembentukan CSIRT ke instansi Pemerintah di Jakarta, 25 Februari 2025.



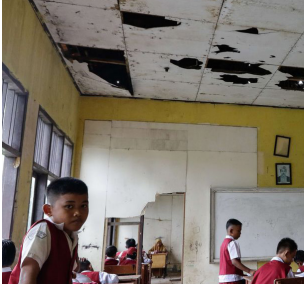
Jaksa Agung bersama Komisar Utama dan Direktur Utama Pertamina mengadakan joint press conference menjelaskan progress pengungkapan kasus korupsi tata kelola di Pertamina, 7 Maret 2025.



Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan BRICS di Kazan mewakili Presiden Prabowo, 22-24 Oktober 2024.



Presiden Prabowo menghadiri KTT D8 di Kairo untuk menerima kepemimpinan Indonesia di kelompok negara berkembang dunia, 19 Desember 2024.



Murid SD Negeri Samudrajaya 04, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi belajar di ruang kelas yang rusak, Senin (20/1/2020).



Kehadiran smart board dapat meningkatkan kualitas belajar di kelas. Utamanya dari menampilkan materi yang disenangi dan mudah dipahami oleh peserta didik.



Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Prof. Stella Christie mengunjungi bakal calon lokasi SMA Garuda di Desa Perlang, Bangka Belitung, 9 Februari 2025.



Presiden Prabowo Subianto menerima menteri koordinator (Menko) dan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, 3 Januari 2025.



Saat menjadi Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo mendirikan 25 RS TNI baru.



Dengan 90.000 kematian per tahun, Indonesia menempati ranking 2 dunia kematian karena TB. Angka insidensi TB di masyarakat meningkat pesat sejak Covid 19. Oleh karena itu upaya ekstra untuk penuntasan kasus TB dibutuhkan, dengan testing, tracing, dan pemberian obat pencegahan.



Kecanduan gawai adalah salah satu dampak negatif dari akses media sosial bagi anak. Selain kecanduan, akses media sosial juga membuka risiko konten negatif, penculikan dan bullying.



Pembentukan Koperasi Merah Putih adalah upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan desa, dengan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas di setiap desa di Indonesia.



Tanggul laut yang dimiliki oleh Jakarta sudah tidak lagi memadai untuk mencegah banjir rob. Diperlukan infrastruktur mitigasi risiko iklim untuk menjaga keberlangsungan giat ekonomi di seluruh pantai utara Jawa.



Pembangunan IKN di era Presiden Prabowo, akan dituntaskan dengan membangun gedung DPR / DPD, gedung MK, gedung MA, dan gedung institusi negara lainnya yang harus berada di Ibu Kota.



Keputusan pailit PT Sritex mengakibatkan PHK 10.969 karyawan. Pemerintah turun tangan untuk memastikan hak-hak karyawan terpenuhi, dan para karyawan dapat segera bekerja lagi.



Sekitar 4 juta orang Indonesia bekerja sebagai ojek online. Sebagaimana sektor lainnya, Pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan mitra aplikasi ojek online.



Sistem perpajakan yang handal adalah fundamental untuk kemajuan bangsa. Penerimaan negara yang saat ini hanya 12% dari PDB harus dijenjot naik agar program-program pro rakyat dapat berjalan optimal.



Danantara adalah upaya untuk memanfaatkan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



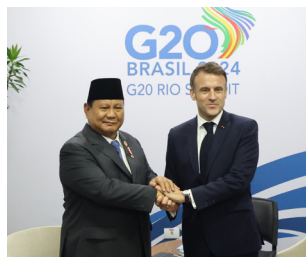
Kebersamaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah syarat mutlak untuk mencapai hasil pembangunan. Dari Rp. 3.621 triliun APBN 2025, Rp. 919 triliun (25%) adalah Transfer ke Daerah (TKD).



Presiden Prabowo menerima Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta, pada 28 November 2024.



Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center (LCC), Peru, pada 15 November 2024.



Presiden Prabowo mendorong perdagangan yang saling menguntungkan antar negara. Memahami setiap negara pasti mengendepankan kepentingan masing-masing, Presiden Prabowo selalu mendorong mitra dagang untuk mencapai konsensus dengan konsesi.



Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day. Senin, 14 Juli 2025, di Paris, Prancis.



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025.



Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir. Senin, 13 Oktober 2025.

Sumber Foto:

1. BPPI Setpres
2. Dok. Bakom
3. Dok. BNPB
4. Dok. Komdigi
5. Antara Foto
6. Dok. Kemensos
7. detik.com
8. Dok. KemenPKP
9. Dok. Kemenkeu
10. Dok. Kemenperin
11. Dok. Kejaung RI
12. Dok. Istimewa
13. hipajak.id
14. Dok. BSSN
15. Dok. KemenkoEkon

“

Yang kita lakukan sekarang adalah transformasi bangsa. Tidak mudah, pasti akan banyak tantangan, pasti banyak kesulitan, pasti banyak yang tidak suka. Tapi selama rakyat mendukung saya, kita harus terus kerjakan hal-hal yang sulit dan banyak tantangan.

Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

”





Kabinet Merah Putih dilantik pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pada 20 Oktober 2025, genap sudah 1 tahun masa kerja Kabinet yang dibentuk dari mandat 96 juta Warga Negara Indonesia kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Demi menjawab harapan publik yang tinggi, Kabinet Merah Putih bekerja dengan cepat untuk mewujudkan janji-janji politik termasuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, meningkatkan gaji guru, memberantas korupsi dan mengoptimalkan anggaran negara untuk kemakmuran rakyat.